

PENDIDIKAN ADIL GENDER DI PONDOK PESANTREN (Studi tentang Membangun *Gender Awareness* di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo)

Hambali¹

¹Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo
Email: ftarbiyah8@gmail.com

Abstract

This research presents about building gender awareness in Nurul Jadid Paiton Probolinggo through gender equitable education. Gender equitable education in Nurul Jadid Paiton Probolinggo is all educational activities that provide fair opportunity to all components of pesantren through gender awareness, both men and women to carry out their roles in educational activities to exercise their rights and obligations in accordance with their roles in a fair and wise. This research uses qualitative method with case study type. The results showed that; 1) Efforts made by the leadership of Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo in building gender awareness is done through; guidance on gender awareness or gender mainstreaming, change of mindset of pesantren civitas, equal gender relation, optimization of women participation in pesantren activity, development of gendered curriculum and reward and punishment. 2) Implication of the implementation of fair education in building gender awareness in Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo, that is; the quality of pesantren is increasing, the atmosphere of public relations and religious pesantren, the creation of harmonization in pesantren, decreased bias and gender gaps in education, optimizing the role of women in educational activities in pesantren.

Keywords: Education, Gender Fair, Pesantren, Gender Awareness

Pendahuluan

Istilah gender diuraikan sebagai perbedaan antara lelaki dan perempuan sebagai hasil dari konstruksi sosio-budaya (Mufidah, 2003). Dengan kata lain, ia merujuk kepada sifat maskulin (*masculinity*) dan feminin (*femininity*) yang dipengaruhi dengan kebudayaan, simbolik, *stereotaip* dan pengenalan diri. Walaupun pada dasarnya gender membicarakan tentang lelaki dan perempuan tetapi perbincangan banyak difokuskan kepada perempuan (Ramli, 2010). Menurut Ursula King (1995: 1), skenario ini disebabkan golongan perempuan telah lama dipinggirkan dalam sejarah dan budaya masyarakat. Selain itu hal ini juga merupakan gerakan globalisasi yang membawa ideologi baru yang bertujuan agar semua menjadi terbuka dan bebas menerima ideologi dan nilai-nilai budaya yang ada (Baharun, 2011).

Kaum perempuan dalam kodratnya sebagai manusia yang diberkati dengan akal, turut memberikan kontribusi besar dalam menghasilkan gagasan, maupun karya berupa seni, moral, hingga hukum yang 'mungkin saja' menjadi kebiasaan (istiadat) dalam kehidupan bermasyarakat (Muali, 2017). Kaum perempuan seringkali kurang mendapatkan kesempatan yang cukup untuk berkiprah dalam kehidupan sosial bila dibandingkan dengan laki laki. Hal ini terjadi karena masih lekatnya ketidakadilan gender dalam masyarakat yang terjemakan dalam marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan yang bersifat menyepelkan (tidak penting) kepada kaum perempuan, bahkan kekerasan (*violence*) termasuk pekerjaan yang lebih banyak (*double burden*) (Fakih, 1997).

Mengapa terjadi perbedaan gender? Karena oleh banyak hal diantaranya: dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural melalui ajaran keagamaan maupun negara. Bentuk ketidakadilan gender ini tidak dapat dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lain, karena saling berhubungan, serta saling mempengaruhi secara dialektis. Misalnya marginalisasi ekonomi kaum perempuan justru terjadi karena *stereotype* tertentu atas kaum perempuan bahwa perempuan itu lemah dan tenaganya murah, yang semuanya itu justru ikut mendukung kepada subordinasi, kekerasan kepada perempuan, yang akhirnya tersosialisasikan ke dalam keyakinan, ideologi dan visi kaum perempuan itu sendiri (Depag, 2003).

Begitu juga bidang keagamaan, khususnya masyarakat Islam. Fenomena ketidakadilan gender dalam Islam ternyata lebih menunjukkan adanya ketidaksewenangan dan penindasan terhadap kaum perempuan, hal ini merupakan akibat pola budaya dan sistem masyarakat muslim yang mayoritas bercorak patrialkal, struktural dan subordinatif, dapat dilihat dalam sejarah

masyarakat muslim. Sempitnya ruang gerak bagi kaum perempuan muslim terjadi justru setelah Islam mengalami perkembangan pesat dengan wilayah kekuasaan luas.

Di samping itu juga, faktor sosio-antropologis sesungguhnya mempunyai peran yang cukup dominan, memunculkan paradigma yang bersifat patriarkhis, genderis, seksis bahkan sikap-sikap yang mencerminkan misoginisme. Sikap misogynis yang dimaksud berupa kekusaran laki-laki atas derajat keberadaannya yang dipersamakan dengan perempuan. Konteks historis, sikap-sikap ini telah ada sejak Islam muncul sebagai gerakan reformasi budaya. Penolakan Islam oleh masyarakat Arab merupakan penolakan atas moralitas yang dinilai telah menghapuskan simbol-simbol superioritas kekuasaan laki-laki (Muhsin, 1994).

Beberapa wacana yang melatarbelakangi perlu adanya upaya menyosialisasikan pendidikan berperspektif gender, yakni sebagai upaya penyadaran terhadap ketidakadilan yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Menyosialisasikan gender bisa dimulai dari beberapa lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal, salah satunya lewat pendidikan di pesantren. Pesantren sebagai ragam lembaga pendidikan Islam yang timbul sebagai bentuk eksperimen pemikiran pendidikan Islam dan respons umat Islam terhadap perkembangan sosial, kebudayaan serta proses sejarah (Baharun, 2017a).

Pondok pesantren misalnya telah lama menjadi lembaga yang memiliki kontribusi yang penting dalam ikut serta mencerdaskan bangsa dan merupakan *sub kultur* masyarakat Indonesia (Rahardjo, 1994: 39). Banyaknya pesantren di Indonesia, serta besarnya siswa pada tiap pesantren menjadikan pesantren sebagai lembaga yang layak diperhitungkan, kaitannya dengan pembangunan bangsa di bidang pendidikan dan moral. Perbaikan-perbaikan yang secara terus-menerus dilakukan terhadap pesantren, baik dari segi manajemen, akademik (kurikulum) maupun fasilitas menjadikan pesantren keluar dari kesan tradisional dan kolot yang selama ini disandangnya. Beberapa pesantren bahkan telah menjadi model dari lembaga pendidikan yang *leading* (Asrohah, 2001: 191).

Salah satu yang menyebabkan pesantren menjadi penting untuk dibicarakan dan diperhitungkan dalam dunia pendidikan karena jangkauannya yang tidak sekadar merambah ranah persekolahan. Padahal pesantren memiliki jangkauan yang lebih luas dari sekadar training di dalam kelas. Untuk itu diperlukan pengenalan terhadap wacana pendidikan berperspektif gender di pesantren, terutama pimpinan pesantren atau kyai sebagai pilar utama gender

meanstreaming, gender merupakan ideologi yang sangat tampak pada perilaku dan perbuatan sehari-hari. Pandangan-pandangan yang bias gender menurut Asrohah (2008: 178) telah mengakar dalam wacana dan praktik keberagamaan tanpa legitimasi ajaran agama, akan menjadi lebih sulit untuk dibongkar atau didekonstruksi jika peran-peran dari tiap elemen masyarakat terutama kyai sebagai tokoh agama tidak diperhitungkan.

Para kyai dengan kelebihan pemahamannya terhadap masalah-masalah agama, seringkali dilihat sebagai orang yang selalu dapat memahami keagungan Tuhan dan rahasia alam, sehingga mereka dianggap memiliki kedudukan yang tidak terjangkau, terutama oleh orang awam. Pemandangan kompetensi di bidang agama ke tangan para kyai dalam suatu masyarakat bukan merupakan suatu realitas yang muncul dengan tiba-tiba, melainkan sudah melalui historisisme seusia dengan umur masyarakat itu sendiri (Dofir, 1994).

Masyarakat pesantren yang pada umumnya masih menganut budaya paternalistik, contoh perilaku berkeadilan gender menjadi sangat penting. Sementara, seperti yang dikemukakan Tholikhah bahwa salah satu kelemahan pesantren (tradisional) aspek kepemimpinan yang sentralistik dan hirarkhis yang berpusat pada kyai, yang menjadikannya (pesantren) laksana 'kerajaan kecil' di mana kyai merupakan sumber mutlak yang memiliki kekuasaan dan kewenangan di lingkungan pesantren, termasuk terhadap ilmu yang diajarkan kepada para santrinya (Tholikhah, 2004: 83).

Kondisi yang harus diupayakan, yaitu kyai mendapatkan akses terhadap dasar-dasar pengetahuan dan pendidikan gender. Untuk membukakan pikiran dan nurani adanya persoalan tersebut. Persoalan gender merupakan persoalan budaya, untuk memahami wacana pendidikan berperspektif gender di pesantren, peran kyai sangat dibutuhkan dan ini mungkin tidak dapat dilaksanakan secara konfrontatif berjangka waktu pendek.

Begitu halnya dengan pimpinan di pondok pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo, kyai memberikan perhatian yang cukup besar terhadap terlaksananya kegiatan pendidikan yang adil gender di pesantren. Hal itu dilakukan dengan berbagai kebijakan yang dibuatnya dengan prinsip-prinsip adil gender. Adanya kebijakan yang berorientasi pada pendidikan adil di pondok pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo dapat meminimalisir terjadinya bias gender yang menimbulkan stereotipe peran perempuan dan laki-laki yang umumnya kurang menguntungkan perempuan, yang telah membudaya sebelumnya di pesantren.

Akan tetapi berkat usaha yang terencana dan sistematis, seluruh kegiatan kependidikan di pesantren bersifat adil gender. Pendidikan yang didasari oleh Kesetaraan dan Keadilan Gender yang dikembangkan di pondok pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo memberikan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, manfaat, serta keikutsertaan dalam berbagai jenis program dan kegiatan pendidikan di pesantren agar kesenjangan gender dapat dihilangkan.

Mengingat pentingnya pendidikan dalam upaya mengangkat harkat dan martabat serta menyiapkan manusia yang memiliki intelektualitas, spiritualitas dan akhlakul kamrimah, maka pendidikan semacam ini memerlukan suatu usaha dan pemikiran yang keras dan serius dalam upaya mewujudkan cita-citanya (Baharun, 2016).

Pendidikan adil gender di pondok pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo adalah seluruh kegiatan kependidikan yang memberikan kesempatan yang adil kepada seluruh komponen pesantren, baik laki-laki maupun perempuan untuk menjalankan perannya dalam kegiatan kependidikan guna melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan perannya tersebut secara adil dan bijaksana.

Berangkat dari hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang pendidikan adil gender dalam membangun *gender awareness* di pondok pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo, mengingat selama ini banyak pondok pesantren yang mengenyampingkan hal tersebut dengan berbagai alasan, baik alasan teologis, ekonomi, sosial budaya dan aspek antropologis.

Kajian Pustaka

Dalam perkembangannya, gender digunakan sebagai pisau analisis untuk memahami realitas sosial berkaitan dengan perempuan dan laki-laki (Setiawan, 1999). Semakin lama sejak kemunculannya, diskursus gender terus mencuat. Bahkan akhir-akhir ini, beberapa analisis dipakai untuk membaca gender dengan berbagai perspektif sosial, ekonomi, politik bahkan agama.

Feminisme dan perempuan merupakan kesan yang muncul ketika membicarakan gender. Padahal keduanya hanya merupakan bagian dari gender itu sendiri. Berbicara feminisme artinya membicarakan ideologi, bukan wacana (Heroepoetri, 2004). Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa feminisme adalah gerakan untuk melawan terhadap praktek-praktek kekerasan, diskriminasi, penindasan, hegemoni, dominasi dan ketidakadilan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok, dan juga sistem terhadap perempuan.

Dinamakan gerakan feminisme (*women*) oleh karena adanya ketidakadilan yang dialami oleh perempuan. Tetapi kemudian makna feminisme mengalami perluasan sesuai perkembangan zaman yaitu bukan hanya membela perempuan yang tertindas tetapi siapa saja yang mengalami ketidakadilan baik laki-laki maupun perempuan.

Istilah gender, belum ada dalam perbendaharaan kamus besar Bahasa Indonesia. Kata gender berasal dari Inggris, *gender* berarti jenis kelamin (Umar, 2001: 33). Gender dapat diartikan sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan perilaku. Secara kodrat, memang diakui adanya perbedaan (*distinction*), bukan pembedaan (*discrimination*) antara laki-laki dengan perempuan yaitu dalam aspek biologis. Perbedaan secara biologis antara laki-laki dengan perempuan yaitu senantiasa digunakan untuk menentukan dalam relasi gender, seperti pembagian status, hak-hak, peran, dan fungsi di dalam masyarakat. Padahal, gender yang dimaksud adalah mengacu kepada peran perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial (Istibsyaroh, 2004). Dimana peran-peran sosial tersebut bisa dipelajari, berubah dari waktu ke waktu, dan beragam menurut budaya dan antar budaya.

Berkenaan dengan pemaknaan gender, Ann Oakley sebagaimana dikutip oleh Ahmad Baidowi (2005: 30), mendefinisikan bahwa gender adalah perbedaan perilaku antara perempuan dan laki-laki yang dikonstruksi secara sosial, diciptakan oleh laki-laki dan perempuan sendiri; oleh karena itu merupakan persoalan budaya. Gender merupakan perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis adalah perbedaan jenis kelamin yang bermula dari kodrat Tuhan, sementara gender adalah perbedaan yang bukan kodrat Tuhan, tetapi diciptakan oleh laki-laki dan perempuan melalui proses sosial budaya yang panjang.

Gender beda dengan seks. Pada umumnya gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial-budaya. Gender berkaitan dengan pikiran dan harapan masyarakat tentang bagaimana sebaiknya menjadi laki-laki atau perempuan. Karena gender merupakan bentukan sosial dari pengalaman masyarakat, maka gender dari waktu ke waktu berubah, dari masing-masing masyarakat berbeda atau sifatnya tidak universal. Gender pun dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan.

Gender adalah perbedaan peran, fungsi, persifatan, dan hak perilaku laki-laki dan perempuan yang dibentuk, dibuat, dan dikonstruksikan oleh masyarakat. Oleh karena itu, gender berhubungan dengan peran baik laki-laki maupun perempuan yang bersifat relatif, dapat berubah, dapat dipertukarkan

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhannya dan jamannya. Perubahan ciri dan sifat-sifat dari gender ini dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat lain.

Sedangkan Pendidikan Adil Gender sebagai konsekuensi dari adanya "Pendidikan Untuk Semua" "(*Education for All*)" termasuk Pendidikan yang didasari oleh Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG). Kata "semua" atau "all" pada "Pendidikan Untuk Semua" bermakna sangat luas, *universal* namun tegas, yaitu untuk manusia siapa saja.

Secara konseptual pendidikan adil gender adalah subset dari Pendidikan untuk semua dan kemudian merupakan sub-set dari hak untuk mendapatkan pendidikan sebagai salah satu komponen dari hak asasi manusia yang sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989.

Pendidikan yang didasari oleh Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG), yang dilakukan secara terencana dan sistematis dengan pendekatan manajerial (Hasan Baharun, 2017), akan mampu memberikan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada laki-laki dan perempuan dalam memperoleh: akses, manfaat, serta keikutsertaan dalam berbagai jenis program pendidikan agar kesenjangan gender dapat dihilangkan.

Secara umum, Pendidikan adil gender adalah tercapainya KKG pada kinerja pembangunan pendidikan nasional yang terdiri atas kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek: (1) Lingkungan strategis pendidikan; (2) pemerataan dan keadilan dalam pendidikan; (3) mutu dan relevansi pendidikan; dan (4) manajemen pendidikan.

Gender Awareness atau kesadaran gender adalah kemampuan untuk mengenali kesenjangan hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki di dalam komunitas pendidikan; dampak pembagian kerja berdasarkan gender terhadap perempuan dan laki-laki; bahwa pengalaman, permasalahan, kebutuhan, kepentingan, aspirasi perempuan dan laki-laki juga berbeda. Kesadaran ini membawanya kepada kepekaan gender yang artinya selalu mempertanyakan apakah suatu kebijakan, program, proyek, kegiatan adalah adil dan berdampak sama terhadap perempuan dan laki-laki dan hasilnya juga sama-sama dinikmati oleh perempuan dan laki-laki.

Bias Gender dalam Pendidikan

Isu gender di era global adalah masalah penindasan dan eksploitasi, kekerasan, dan persamaan hak dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Masalah yang sering muncul adalah perdagangan perempuan, dan pelacuran

paksa, yang umumnya timbul dari berbagai faktor yang saling terkait, antara lain dampak negatif dari proses urbanisasi, relatif tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, serta rendahnya tingkat pendidikan.

Dalam konteks kepentingan nasional, permasalahan yang perlu diantisipasi dalam dunia pendidikan adalah : pertama, bagaimana kita dapat menjamin bahwa wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dapat dituntaskan di semua daerah kabupaten dan daerah kota. Kedua, bagaimana kita dapat mengamankan program pendidikan dan kebudayaan yang dapat memberikan peluang kreativitas dan keragaman daerah, tetapi semuanya mengarah secara sentripetal ke kepentingan nasional melalui muatan yang sama dalam upaya pembentukan "national character building". Ketiga pendidikan merupakan investasi jangka panjang, yang kadang-kadang kurang menarik bagi sebagian pejabat daerah, karena hasilnya tidak dapat dilihat dan dinikmati, sebaliknya pembangunan fisik merupakan investasi jangka pendek yang segera dapat dilihat (Baharun, 2012).

Mengapa terjadi "perbedaan" gender? Terbentuknya perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural melalui ajaran keagamaan maupun negara. Melalui proses panjang, sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap seolah-olah ketentuan Tuhan. Sebaliknya melalui dialektika konstruksi sosial gender secara evolusional dan perlahan-lahan mempengaruhi biologis masing-masing.

Yang dimaksud bias gender adalah mengunggulkan salah satu jenis kelamin dalam kehidupan sosial atau kebijakan publik. Bias gender dalam pendidikan adalah realitas pendidikan yang mengunggulkan satu jenis kelamin tertentu sehingga menyebabkan ketimpangan gender (Asrohah, 2008).

Menurut Mufidah, dalam banyak kajian terbukti bahwa pembakuan peran dan pandangan yang bias gender adalah bersumber dari budaya patriarkhi dan matriarkhi yang sangat sangat berpotensi menimbulkan ketidakadilan baik pada perempuan maupun pada laki-laki. Budaya patriarkhi cenderung mengutamakan laki-laki lebih dari perempuan. Sebaliknya budaya matriarkhi cenderung mengutamakan perempuan diatas laki-laki . Manifestasi dari ketidakadilan gender yang bersumber dari budaya tersebut diatas adalah:

1. Stereotype

Pelabelan terhadap jenis kelamin laki-laki atau perempuan yang selalu berkonotasi negatif sehingga sering menimbulkan masalah, misalnya perempuan lemah, penakut, cerewet, emosional kurang bisa bertanggung jawab dan sebagainya . Sedangkan laki-laki dipandang kuat, keras, kasar,

rasional, egois, dan pencemburu, pelabelan seperti ini akan merugikan bagi keduanya , karena akan berimplikasi pembagian peran yang tidak seimbang dan timbul ketidakadilan .

2. Subordinasi

Sebuah pandangan yang tidak adil terhadap salah satu jenis kelamin yang didasarkan pada stereotype gender , menyebabkan penempatan salah satu jenis kelamin pada status, peran, dan relasi yang tidak setara dan adil. Biasanya laki-laki lebih dipandang unggul berada pada supraordinat posisi yang banyak berperan dalam produksi maupun pengambilan keputusan, Sementara perempuan dianggap berada pada subordinat, posisi ini merupakan penghambat akses partisipasi, fungsi kontrol terutama yang berhubungan dengan pengambilan keputusan.

3. Marjinalisasi

Merupakan proses peminggiran baik sengaja maupun tidak disengaja terhadap jenis kelamin tertentu dari jenis kelamin yang lainnya secara sistemik dari mendapatkan akses, dan manfaat dalam kehidupan akibat dari stereotype dan subordinasi. Dampaknya adalah perempuan sangat tertinggal dari laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan dimasyarakat , dari pendidikan, ekonomi, dan juga politik.

4. Beban Kerja yang Tidak Proporsional

Pemaksaan dan atau pengabaian salah satu jenis kelamin menanggung beban aktifitas berlebihan yang disebabkan pembakuan peran produktif-reproduktif untuk laki-laki dan perempuan yang kemudian berdampak pada pola pembagian kerja yang tidak fleksibel , pola kerja dikotomis atas dasar jenis kelamin demikian ini dapat memicu ketidakadilan gender akibat beban kerja yang berlipat. Hal ini dialami oleh perempuan disamping berperan sebagai ibu rumah tangga yang tugasnya tak terhingga , lebih-lebih jika ia bekerja pula, beban itu bertambah berat dipikul oleh seorang perempuan , bukannya ia dapat berperan ganda akan tetapi ia memiliki tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang berlipat ganda.

5. Kekerasan yang Berbasis Gender

Pandangan bias gender yang menempatkan laki-laki adalah superior dan perempuan adalah inferior, berdampak pada hubungan hierarkhis bukan setara, relasi yang timpang gender ini rentan terjadi kekerasan dimana pihak yang lebih berkuasa melakukan kekerasan terhadap pihak yang dikuasai. Umumnya kekerasan berbasis gender ini lebih banyak dialami perempuan dibanding dengan laki-laki. Hal tersebut didasarkan

pada persepsi dominan bahwa perempuan adalah makhluk lemah kurang memiliki kemandirian (Fakih, 1997).

Berbagai bentuk kesenjangan gender yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, terpresentasi juga dalam dunia pendidikan. Bahkan proses dan institusi pendidikan dipandang berperan besar dalam mensosialisasikan dan melestrikan nilai-nilai dan cara pandang yang mendasari munculnya berbagai ketimpangan gender dalam masyarakat. Secara garis besar, fenomena kesenjangan gender dalam pendidikan dapat diklasifikasi dalam beberapa dimensi, antara lain:

1. Kurangnya partisipasi (*under-participation*). Dalam hal partisipasi pendidikan, perempuan di seluruh dunia menghadapi problem yang sama. Dibanding lawan jenisnya, partisipasi perempuan dalam pendidikan formal jauh lebih rendah. Di negara-negara dunia ketiga di mana pendidikan dasar belum diwajibkan, jumlah murid perempuan umumnya hanya separuh atau sepertiga jumlah murid laki-laki (Amasari, 2005).
2. Kurangnya keterwakilan (*under-representation*). Partisipasi perempuan dalam pendidikan sebagai tenaga pengajar maupun pimpinan juga menunjukkan kecenderungan disparitas progresif. Jumlah guru perempuan pada jenjang pendidikan dasar umumnya sama atau melebihi jumlah guru laki-laki. Namun, pada jenjang pendidikan lanjutan dan pendidikan tinggi, jumlah tersebut menunjukkan penurunan drastis.
3. Perlakuan yang tidak adil (*unfair treatment*). Kegiatan pembelajaran dan proses interaksi dalam kelas seringkali bersifat merugikan murid perempuan. Guru secara tidak sadar cenderung menaruh harapan dan perhatian yang lebih besar kepada murid laki-laki dibanding murid perempuan. Para guru kadangkala cenderung berpikir ke arah "*self fulfilling prophecy*" terhadap siswa perempuan karena menganggap perempuan tidak perlu memperoleh pendidikan yang tinggi.

Menurut Philip Robinson, ketimpangan dalam pendidikan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ketimpangan pada akses terhadap pendidikan dan ketimpangan pada hasil atau outcome pendidikan (Robinson, 1981: 277).

Kesetaraan Gender dalam Pendidikan

Keadilan dan kesetaraan adalah gagasan dasar, tujuan dan misi utama peradaban manusia untuk mencapai kesejahteraan, membangun keharmonisan kehidupan bermasyarakat, bernegara dan membangun keluarga berkualitas. Jumlah penduduk perempuan hampir setengah dari seluruh penduduk Indonesia dan merupakan potensi yang sangat besar dalam mencapai

kemajuan dan kehidupan yang lebih berkualitas.

Kesetaraan Gender, Kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan & keamanan nasional (hankamnas) serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Keadilan gender suatu perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Perbedaan biologis tidak bisa dijadikan dasar untuk terjadinya diskriminasi mengenai hak sosial, budaya, hukum dan politik terhadap satu jenis kelamin tertentu.

Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.

Hasil Penelitian

Upaya Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo dalam Membangun *Gender Awareness*

1. Pembinaan tentang *Gender Awareness* atau *Gender Mainstreaming*

Pembinaan tentang *gender awareness* atau *gender mainstreaming* merupakan strategi yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan jender dalam pembangunan, di mana aspek gender terintegrasi dalam perumusan kebijakan program dan kegiatan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Pimpinan di pondok pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo memberikan pembinaan kepada seluruh komponen pesantren melalui aktivitas pendidikan dan pembelajaran yang diselenggarakan di sekolah, madrasah, lembaga pendidikan non formal, pendidikan diniyah tentang pentingnya pemahaman gender awareness (kesadaran gender). Isi pembinaannya tentang bagaimana membagi tugas dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam kegiatan di lembaga pendidikan maupun rumah tangga, yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Pembinaan ini penting dilakukan sehingga tidak terjadi lagi suatu batasan-batasan bagi kaum laki-laki dan perempuan yang mana kegiatan itu bisa dilakukan keduanya yang tidak melanggar perintah agama.

2. Perubahan *Mindset* Civitas Pesantren

Dalam rangka mewujudkan kesadaran gender (*Gender Awareness*), pimpinan di pondok pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo memberikan pemahaman terhadap seluruh komponen pesantren tentang hakikat dari gender.

Dalam mengarahkan pola pikir yang benar tentang gender, kita tidak berjalan sendiri untuk menyampaikan materi tetapi kita adakan seminar, lokakarya, dan lain-lain dengan mendatangkan para ahli sebagai nara sumber untuk memberikan wawasan kepada para santri. Tentunya pembahasan tentang isu-isu gender terkini juga dimasukkan dan bagaimana perkembangan gender sejak zaman dahulu misalnya zaman Rasulullah sampai sekarang dan bagaimana tentang gender di Indonesia maupun di mancanegara.

Perlakuan yang tidak adil (*unfair treatment*) dalam kegiatan pembelajaran dan proses interaksi dalam kelas seringkali bersifat merugikan murid perempuan. Guru secara tidak sadar cenderung menaruh harapan dan perhatian yang lebih besar kepada murid laki-laki dibanding murid perempuan. Para guru kadangkala cenderung berpikir ke arah "*self fulfilling prophecy*" terhadap siswa perempuan karena menganggap perempuan tidak perlu memperoleh pendidikan yang tinggi.

Pembinaan dengan menambah wawasan para santri maupun para guru dengan belajar langsung dari yang ahli dapat berimplikasi positif ke depannya sehingga mereka benar-benar sadar tentang apa tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing, baik sebagai laki-laki maupun perempuan. Dengan adanya wawasan itu mereka memahami tentang perbedaan antara jenis kelamin biologis yang sudah menjadi kodrat masing-masing dan tidak bisa dipertukarkan jenis kelamin sosial yang terlanjur dibentuk oleh masyarakat sehingga menjadi penyebab perempuan tidak memiliki kebebasan dalam hal vokasional atau profesi, peran dalam masyarakat yang hanya di balik layar, dan menimbulkan perasaan diperlakukan tidak adil.

3. *Equal Gender Relation* (Pemerataan Peran dalam Aktivitas Pesantren)

Equal gender relation (hubungan jender setara) merupakan upaya yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo dalam menyetarakan posisi antara laki-laki dan perempuan didasarkan kepada keterampilan, keahlian dan kompetensi dan tidak didasarkan kepada perbedaan feminitas dan maskulinitas.

Laki-laki dan perempuan diberi peran yang sama dalam aktivitas yang ada di pesantren. Tidak ada perbedaan wewenang dalam masalah tugas dan tanggung jawab, intinya, laki-laki dan perempuan mampu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mengelola lembaga pendidikan pesantren di pondok pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

Peran laki-laki dan perempuan memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing. Yang berkuasa bukan hanya laki-laki, tapi perempuan juga berpartisipasi dan bertanggung jawab sesuai perannya dan dalam koridor agama.

Ada beberapa dimensi yang menjadikan minimnya peran perempuan. Pertama, dimensi akses adalah fasilitas pendidikan yang sulit dicapai atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya tanpa memiliki otoritas untuk memutuskan terhadap produk/hasil maupun metode pendayagunaan sumber daya tersebut. Faktor penyebabnya antara lain kurang tersedianya sekolah menengah di setiap kecamatan, jarak yang jauh dari tempat tinggal, beban tugas rumah tangga yang banyak dibebankan pada anak. Akumulasi dari faktor-faktor ini membuat banyak anak-anak yang cepat meninggalkan bangku sekolah.

Kedua, dimensi kontrol yaitu kemampuan atau otoritas untuk memutuskan menggunakan produk atau hasil, bahkan juga untuk menentukan metode pendayagunaannya, sehingga memiliki kekuatan untuk mendapatkan keuntungan dari sumber daya tersebut. Faktor penyebabnya tidak memiliki otoritas atau kemampuan untuk menggunakan maupun mendayagunakan sumber daya.

Ketiga, yaitu dimensi penguasaan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk memajukan peranannya dalam masyarakat. Faktor penyebabnya pemanfaatan yang minim, peran yang tidak terserap oleh masyarakat dan masih berpegang pada nilai-nilai lama yang tidak terreformasi. Contohnya saja buta huruf yang didominasi oleh kaum perempuan.

Pemerataan peran dalam aktivitas di pesantren menghilangkan adanya diskriminasi terhadap perempuan sehingga terciptanya suasana pesantren yang humanis dan harmonis, yaitu memposisikan manusia sesuai dengan porsinya tanpa perbedaan jenis kelamin sosial dan memenuhi hak-hak mereka sebagai warga pesantren yang menjalankan proses pendidikan.

4. Optimalisasi Partisipasi Perempuan dalam Aktivitas Pesantren

Pesantren mulai memberikan peluang kepada kaum hawa untuk berpartisipasi dalam memajukan pesantren. Mengoptimalkan peran perempuan, mengembangkan keterampilan, daya pikir, dan potensi mereka. Jadi mereka tidak berpikir setelah lulus hanya berkecimpung di dapur saja. Mereka bisa mengembangkan diri, mendidik anak-anaknya nanti dan bisa bekerjasama dengan laki-laki melaksanakan visi agama Islam.

Dalam hal partisipasi pendidikan, perempuan di seluruh dunia menghadapi problem yang samayakni kurangnya partisipasi (*under-participation*). Dibanding lawan jenisnya, partisipasi perempuan dalam pendidikan formal jauh lebih rendah. Di negara-negara dunia di mana pendidikan dasar belum diwajibkan, jumlah murid perempuan umumnya hanya separuh atau sepertiga jumlah murid laki-laki. Partisipasi perempuan dalam pendidikan sebagai tenaga pengajar maupun pimpinan juga menunjukkan kecenderungan disparitas progresif. Jumlah guru perempuan pada jenjang pendidikan dasar umumnya sama atau melebihi jumlah guru laki-laki. Namun, pada jenjang pendidikan lanjutan dan pendidikan tinggi, jumlah tersebut menunjukkan penurunan drastis. Hal ini menimbulkan kurangnya keterwakilan (*under-representation*) perempuan dalam kancah profesi.

Seiring dengan dibukanya peluang bagi kaum hawa untuk berpartisipasi dan berperan dalam pendidikan secara profesional, maka mutu pesantren semakin meningkat. Baik laki-laki maupun perempuan diberi kesempatan yang sama dalam pendidikan.

5. Pengembangan Kurikulum Berwawasan Gender

Muatan kurikulum nasional yang menghilangkan dikotomis antara laki-laki dan perempuan, demikian pula kurikulum lokal dengan berbasis kesetaraan, keadilan dan keseimbangan. Kurikulum disusun sesuai dengan kebutuhan dan tipologi daerah yang dimulai dari tingkat pendidikan Taman Kanak-Kanak sampai ke tingkat Perguruan Tinggi.

Dimensi proses pembelajaran adalah materi pendidikan misalnya yang terdapat dalam contoh-contoh soal dimana semua kepemilikan selalu mengatasnamakan laki-laki. Dalam buku-buku pelajaran misalnya semua jabatan formal dalam buku seperti camat dan direktur digambarkan dijabat oleh laki-laki. Selain itu ilustrasi gambar juga bias gender, yang seolah-olah menggambarkan bahwa tugas wanita adalah sebagai ibu rumah tangga

dengan tugas-tugas menjahit, memasak dan mencuci. Faktor penyebabnya adalah *stereotype gender*.

Kurikulum yang tidak bias gender akan memberikan pemahaman terhadap pola pikir santri bahwa kegiatan sehari-hari yang dikerjakan yang dicontohkan nantinya bisa dimengerti mana yang bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dan mana yang hanya bisa dilakukan oleh salah satunya sehingga timbul kesadaran akan kesetaraan gender.

Penanaman konsep ideologi gender bagi anak dapat dilakukan pada buku teks melalui penyusunan wacana yang berperspektif gender. Gambar ilustrasi yang ada pada buku teks sangat berpengaruh pada tingkat perkembangan sosial siswa. Penggunaan gambar ilustrasi dapat meningkatkan belajar informasi verbal. Buku teks yang mencerminkan kualitas proses sosial hubungan perempuan dan laki-laki yang setara tanpa adanya tendensi muatan pesan makna yang diskriminatif dan subordinatif, maka secara tidak langsung akan menghasilkan perolehan kualitas mental si pebelajar yang akan menghargai semangat kesetaraan gender.

Oleh karena itu, setiap pendidik harus mampu untuk menelaah teks bahan ajar kemudian merekonstruksi menjadi cerita dan ilustrasi yang responsif gender. Sehingga model pendidikan peka gender bukan menjadikan "Gender dalam Pendidikan" menjadi materi tersendiri, tetapi terintegrasi di dalam setiap mata pelajaran.

Keadilan gender adalah keadilan dalam memperlakukan perempuan dan laki-laki sesuai kebutuhan mereka. Hal ini mencakup perlakuan yang setara atau perlakuan yang berbeda tetapi diperhitungkan ekuivalen dalam hal hak, kewajiban, kepentingan dan kesempatannya

6. *Reward and Punishment*

Pesantren memberikan penghargaan bagi mereka yang berprestasi dalam semua bidang, tanpa membedakan jenis status gendernya. Begitu juga hukuman yang diberikan statusnya sama. Dalam hal ini, barokah serta syafa'at merupakan reward sedangkan tata tertib yang ada di Pondok Pesantren Nurul Jadid sebagai punishment yang mana tata tertib tersebut berisi pelanggaran-pelanggaran dan sanksi-sanksi. Sehingga dalam aktivitas sehari-hari tidak semata-mata sendiri, harus ada batasan-batasan tertentu.

Hal inilah yang disebut keseimbangan antara reward and punishment. Di sisi lain, santri mendapatkan barokah dari petunjuk dari kitab yang dikaji serta mengetahui tentang kitab tersebut, sedangkan sisi lain santri harus mengikuti apa yang diperintahkan ustadz kepada santrinya.

Implikasi Pelaksanaan Pendidikan Adil dalam Membangun *Gender awarness* di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo

1. Optimalisasi Peran Wanita dalam aktivitas Pendidikan di Pesantren

Peran wanita dalam pesantren sebenarnya telah muncul berbarengan dengan terbukanya ruang partisipasi wanita di pesantren. Ketimpangan gender yang terjadi di pesantren merupakan warisan budaya pra-pendahulunya, yang kemudian dikuatkan oleh legitimasi tafsir agama. Superior laki-laki sebagai warisan budaya pra-Islam belum sepenuhnya terkikis oleh referensi budaya islami yang dilakukan Nabi Muhammad Saw. Sebab itu, pemahaman terhadap ajaran Islam harus disesuaikan dengan konteks sosiologis, dengan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, kemaslahatan dan kerahmatan untuk semua umat manusia, tanpa harus dibatasi oleh jenis kelamin, laki-laki atau wanita.

Pondok Pesantren Nurul Jadid dapat dikategorikan sebagai pesantren yang sudah semi modern. Selain telah berdiri lembaga pendidikan formal, juga munculnya pemahaman yang menempatkan wanita sebagai individu yang layak memegang amanah di Lingkungan Pesantren tersebut.

Peran wanita kalau boleh disebutkan telah tumbuh dan berkembang meskipun secara implisit. Hal itu lebih dikarenakan masih banyaknya sumber daya laki-laki yang memegang peranan strategis dan demi kestabilan organisasi yang dijalankan di pesantren tersebut. Peneliti juga mengamati secara langsung munculnya nilai-nilai feminisme di pesantren tersebut, yang agak berbeda dengan kondisi beberapa tahun sebelumnya. Budaya patriarkhal sebagai warisan budaya pesantren tersebut, lambat laun mulai bergeser ke arah profesionalisme kerja, meskipun pada tampuk kepemimpinan di pesantren masih didominasi oleh kaum laki-laki.

Peneliti memaknai bahwa telah terjadi pergeseran paradigma berpikir dari patriarkhalisme ke arah profesionalisme. Pergeseran itu makin terbuka karena pesantren ini telah menerapkan sistem pesantren dan keorganisasian modern.

Peran wanita telah berkembang secara formal di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton. Dalam artian telah ada pengakuan secara formal bahwa wanita mendapatkan ruang untuk mengembangkan peranan dan partisipasinya di lingkungan pesantren. Sedangkan secara kultural, masih terdapat sisa-sisa budaya patriarkhi yang tidak mudah dihilangkan dari pesantren meskipun telah ada perubahan sedikit demi sedikit.

2. Berkurangnya Bias dan Kesenjangan Gender dalam Pendidikan

Kurangnya partisipasi (*under-participation*). Dalam hal partisipasi pendidikan, wanita di seluruh dunia menghadapi problem yang sama. Dibanding lawan jenisnya, partisipasi wanita dalam pendidikan formal jauh lebih rendah. Di negara-negara dunia ketiga dimana pendidikan dasar belum diwajibkan, jumlah murid wanita umumnya hanya separuh atau sepertiga jumlah murid laki-laki.

3. Terciptanya Harmonisasi di Pesantren

Pondok Pesantren Nurul Jadid berupaya mempertahankan harmonisasi, integralisasi, pribumisasi dimensi religius kemasyarakatan, kenegaraan, dan kebangsaan. Di Pondok Pesantren Nurul Jadid juga memiliki cara pandang berfikir mereka sudah mampu hidup mandiri, karna segala sesuatu harus mereka sendiri yang melakukan tanpa di manjakan orang tua, alhasil mereka sedikitnya tau mana yang harus mereka lakukan dan yang tidak.

Salah satu kegiatan santri yang menjadikan mereka rukun dan saling berbagi hal yaitu kegiatan belajar bersama ketika malam hari, pemandangan yang membuat hati tersentuh, ketika kakak kelas mengajari adik kelasnya yang tidak mengerti pelajaran di sekolahnya. Meski tak jarang ketika kegiatan belajar banyak yang bermain dan bercanda namun setidaknya mereka lebih mandiri dan tak terpengaruh oleh tayangan televisi yang dilakukan santri di rumah.

4. Suasana Pesantren yang Humas dan Relegius

Pesantren merupakan sistem pendidikan tertua khas Indonesia. Ia merupakan sumber inspirasi yang tidak pernah kering bagi para pencita ilmu dan peneliti yang berupaya mengurai anatominya dari berbagai dimensi. Pesantren sebagai pranata pendidikan ulama (intelektual) pada umumnya terus menyelenggarakan misinya agar umat menjadi *Tafaqquh Fiddin* dan memotifasi kader ulama dalam misi dan fungsinya sebagai *Warasat al Anbiya*, sehingga akan terbentuk karakter manusia yang paripurna atau *insanul kamil* (Baharun, 2017b)

Sekarang ini, pesantren semakin diharapkan tampil dengan tawaran-tawaran kultural yang produktif dan konstruktif, serta mampu menyatakan diri sebagai pembawa kebaikan untuk semua, tanpa eksklusifisme komunal. Mengingat, pesantren selain jumlah siswa atau santrinya mayoritas, juga mempunyai potensi nilai universal.

5. Mutu Pesantren Semakin Meningkat

Sebagai kaum hawa pada pondok pesantren mereka dapat memanfaatkan ilmu yang diperoleh melalui pendidikan formal untuk memperkaya wawasan dan pembelajaran di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Selain itu pengetahuan umum dalam berbagai bidang dapat memperkaya dan menghidupkan diskusi tentang masalah kekinian yang dikaitkan dengan agama.

Untuk meningkatkan mutu, para santriwati juga mengikuti pelatihan-pelatihan serta mengadakan penataran-penataran bidang studi tertentu atau mengadakan pengajian-pengajian khusus untuk pengajar. Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton melakukan musyawarah khusus pengajar atau dengan *bahstul masail* untuk meningkatkan mutu pengajarannya. Di dalam musyawarah ini semua pengajar dianjurkan mengemukakan pendapat atau memberikan tanggapan atas materi yang menjadi pokok bahasan sehingga terjadi diskusi yang pada akhirnya dapat menambah wawasan para pengajar. Di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton pada waktu-waktu tertentu ada pertemuan dan diskusi antar pengajar yang tujuannya untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu pengajaran pondok pesantren.

Santri putri yang sekaligus sebagai ustadzah mempunyai peran yang cukup penting karena sebagai santri yang dianggap senior serta sebagai pengajar mau tidak mau mereka harus menjadi contoh dan panutan santri-santri yang lain. Kewenangan ustadzah dalam pondok pesantren hanya sebatas pada masalah pengajaran, kecuali bila ustadzah juga merangkap sebagai pengurus pondok pesantren. Sebagai ustadzah dan pengurus pondok pesantren mereka dituntut dapat membantu dan menjadi kepanjangan tangan Kyai dalam mengelola pondok pesantren. Peran aktif santri-ustadzah secara umum dapat kita lihat pada setiap pertemuan dan musyawarah yang membahas pengembangan pondok pesantren. Para ustadzah ini banyak memberikan masukan/saran dan inovasi-inovasi yang mungkin dapat diterapkan untuk pengembangan pengajaran di pondok pesantren. Selain berperan dalam proses pembelajaran santri di Pondok Pesantren Nurul Jadid, ustadzah juga berperan untuk mengawasi dan membimbing santri putri dalam belajar dan mengembangkan budi pekerti yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Askiah. 1999. *Islam dan Hak-Hak Perempuan: Perspektif Asia Tenggara*, dalam Syafiq Hasyim (ed), *Menakar "Harga" Perempuan Eksplorasi Lanjut Atas Hak-hak Reproduksi*. Bandung: Mizan.
- Al-Quran dan Terjemahannya*. 1997. Departemen Agama Direktorat Jendral Agama Republik Indonesia.
- Amasari. 2005. *Laporan Penelitian Pendidikan Berujatuaan Gender*. Banjamasin: IAIN Antasari.
- Asrohah, Hanun. 2001. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos.
- Asrohah, Hanun. 2008. *Sosiologi Pendidikan*. Surabaya: Kopertais Press.
- Baharun, H., & Mundiri, A. (2011). *Metodologi Studi Islam: Percikan Pemikiran Tokoh Dalam Membumikan Agama*. *Jogjakarta: Ar-Ruzz Media*.
- Baharun, H. (2012). DESENTRALISASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGEMBANGAN SISTEM PENDIDIKAN ISLAM. *Jurnal At-Tajdid*, 1(2).
- Baharun, H. (2016). PENDIDIKAN ANAK DALAM KELUARGA; TELAAH EPISTEMOLOGIS. *Pedagogik*, 3(2), 96-107.
- Baharun, H. (2017a). *Pengembangan Kurikulum; Teori dan Praktik (Konsep, Prinsip, Pendekatan dan Langkah-langkah Pengembangan Kurikulum PAI*. Yogyakarta: CV Cantrik Pustaka.
- Baharun, H. (2017b). Total Moral Quality: A New Approach for Character Education in Pesantren. *Ulumuna*, 21(1), 57-80.
- Hasan Baharun, Z. (2017). *Manajemen Mutu Pendidikan : Ikhtiar dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah melalui Pendekatan Balanced Scorecard*. Tulungagung: Akademia Pustaka.
- Baidowi, Ahmad. 2005. *Tafsir Feminis; Kajian Perempuan dalam al-Qur'an dan Para Maufasir Kontemporer*. Bandung: Nuansa.
- Baroroh, Umul. 2002. *Perempuan sebagai Kepala Keluarga dalam Sri Suhandjati Sukri, Bias Gender dalam Pemahaman Islam*. Jakarta: Gema Media.
- Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam. 2003. *Istiqro' Jurnal Penelitian Islam Indonesia*. 01, Vol. 02.
- Dofir, Zamaksyari. 1994. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES.

- Engineer, Asghar Ali. 2000. *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*. Yogyakarta: Terj. Tim LSPPA, SPPA.
- Fakih, Mansour dkk. 1996. *Membincang Feminisme, Diskursus Gender Berperspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Fakih, Mansour. 1997. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gonibala, Rukmina. 2007. *Fenomena Bias Gender dalam Pendidikan Islam*. (artikel STAIN Manado Juli).
- Heroepoetri, Arimbi dan R. Valentina. 2004. *Percakapan Tentang Feminisme vs Neoliberalisme*. Jakarta: DebtWATCH.
- Istibsyaroh. 2004. *Hak-Hak Perempuan; Relasi Gender menurut Tafsir Al-Sya'rawi*. Jakarta: Teraju.
- King, Ursula. 1995. *Introduction: Gender and Study of Religion* dalam Ursula King (ed.), *Religion and Gender*. Oxford UK: Blackwell Publishers.
- Mas'udi, Masdar F. 1997. *Perempuan dalam Wacana Keislaman*. Jakarta: Obor.
- Meolong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosda Karya.
- Muali, C. (2017). Rasionalitas Konsepsi Budaya Nusantara dalam Menggagas Pendidikan Karakter Bangsa Multikultural. *Jurnal Islam Nusantara*, 1(1), 105 - 117.
- Mufidah, Ch. 2003. *Paradigma Gender*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Muhammad, Husain. 2001. *Fiqh Perempuan, Refleksi Kyai atas Wacana agama dan Gender*. Yogyakarta: LKIS.
- Muhsin, Aminah Wadud. 1994. *Wanita dalam al-Quran*. Bandung: Pustaka.
- Muthohar, Ahmad. 2007. *Ideologi Pendidikan Pesantren: Pesantren di Tengah Arus Ideologi-ideologi Pendidikan*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Nasution, S. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nasution. 1999. *Metode Penelitian Naturalistik-kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Natsir, Lies Marcoes dan J.H. Meuleman. 1993. *Wanita Indonesia dalam Kajian Teks dan Kontektual Islam*. Jakarta: INIS.
- Raharjdo, M. Dawam. 1994. *Pesantren dan Pembaharuan*. Jakarta: LP3ES.

- Ramli, Moh. Anuar. 2010. *Bias Gender dalam Masyarakat Muslim: Antara Ajaran Islam dengan Tradisi Tempatan*. Journal of Fiqh, No. 7, 50.
- Robinson, Philip. 1981. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Setiawan, Hersri. 1999. *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Graha Budaya dan Kalyanamitra.
- Sodik, Mochamad dan Inayah Rohmaniyah. 2003. *Perempuan Tertindas; Kajian Hadits-hadits "Misoginis"*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga.
- Subhan, Arif dkk. 2003. *Citra Perempuan dalam Islam*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suryadi, Ace dan Ecep Idris. 2004. *Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan*. Bandung: Genesindo.
- Tholkhah, Imam dkk. 2004. *Membuka Jendela Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Umar, Nasaruddin. 2001. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.